



RENCANA KERJA TAHUN 2024

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024, ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 yaitu “ **Mewujudkan Masyarakat Papua Yang Mandiri Dalam Segala Bidang Dalam Tata Kehidupan Yang Harmonis Dan Selaras Dengan Alam**”

Penyusunan RENJA Tahun 2024 berisikan usulan rencana kerja program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua mengacu Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yaitu Prioritas 5 “Peningkatan Tata Kelola Pegadaan”

Jayapura, Agustus 2023


KEPALA BIRO,
DEBORA D. SALOSA, S.Hut, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19771223 200212 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022.....	5
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022	5
2.2. Isu-Isu Penyelenggara Tugas dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa	70
2.3. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	71
BAB III. TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	72
3.1. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	72
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	72
BAB IV. PENUTUP	73
LAMPIRAN.	

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan petunjuk teknis, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Papua.

Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan pelayananan pengadaan barang dan jasa sebagaimana prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa serta bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan guna menjamin tercapainya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terbuka, transparan, akuntable dan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan

dan kesejahteraan di Provinsi Papua maka diperlukan suatu perencanaan yaitu Rencana Kerja Tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi dan dapat menjawab visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Papua.

Penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otomomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, tahun 2019-2023.
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai Dokumen Perencanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pelayanan pengadaan Barang dan Jasa dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024 yaitu :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024.
2. Sebagai sarana pengendalian progra dan kegiatan Tahun 2024;
3. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang memuat uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU yang memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun n-1, analisa kinerja tahun n-1, isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN memuat tujuan dan sasaran Renja dan program kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2022

A. Capaian Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

Pengukuran Pencapaian Kinerja Hasil capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022.

Tabel 2.1.
*Pengukuran Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa
SETDA Provinsi Papua Tahun 2022*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	persen	Ket
1	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	99,12	99,12	Teralisasi 226 paket dari 229 paket yang berproses
		Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ	Persen	5	8,43	168,6	Target 5% terealisasi 8,54%
2	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara eletronik	Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ oleh SKPD	Persen	85	100	100	35 SKPD yang menginput RUP dari target 35 SKPD
3.	Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ	Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Persen	60	57,62	96,04	Target 35 dari 59 Quota JFT teralisasi 34 JFT
		Tingkat capaian Kematangan UKPBJ	Level	3	3	100	Telah terpenuhi variabel tingkat kematangan level 3
		Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	Jumlah sanggahan telah dijawab pokja dan terselesaikan
4	Meningkatnya Auntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua	Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua	Nilai SAKIP	BB	100	100	Hasil penilaian SAKIP 2021
RATA-RATA CAPAIAN						109,11	

Dari tabel 2.1. rata-rata capaian indikator kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022 sebesar 109,11 persen. Capaian-capaian indikator kinerja tertinggi yaitu pada

indikator efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan pengadaan Barang dan Jasa. Capaian indikator kinerja di bawah 100 persen yaitu pada indikator kinerja efektifitas pelaksanaan pemilihan pengadaan barang dan jasa dan persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan barang dan Jasa.

Rata-rata capaian sasaran strategis yang dicapai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022 sebesar 109,11 persen dengan kategori “sangat berhasil”.

Adapun realisasi capaian berdasarkan setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1. Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Sasaran strategis 1 terdiri dari 2 indikator yaitu :

- a. Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dari target capaian indikator sebesar 100% tercapai 99,12%.Dapat dijelaskan bahwa dari 228 paket yang diproses melalui mekanisme tender dan seleksi sebanyak 226 paket yang selesai proses tender/seleksi, sedangkan 2 paket gagal.

Rincian data paket tender/seleksi sebagai berikut:

Tabel 2.2.

**Realisasi Pelaksanaan Tender/Seleksi Pengadaan
Barang/Jasa Per Jenis Pengadaan Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah Paket Tender/Seleksi Selesai	Persen Terhadap Total
1	Pekerjaan Konstruksi	114	50,44
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	83	36,73
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	23	10,18
4	Jasa Lainnya	3	1,33
5	Pengadaan Barang	3	1,33
	JUMLAH TOTAL	226	100

Ket : Data diolah

Dari total 226 paket yang selesai berproses, jumlah paket terbanyak yaitu paket pekerjaan konstruksi sebanyak 114 paket atau 50,44%, Paket pekerjaan Jasa Konsultans Badan Usaha Konstruksi sebanyak 83 paket atau 36,73 persen, Paket pekerjaan Jasa Konsultans Badan Usaha Non Konstruksi sebanyak 23 paket atau 10,18 persen, paket pekerjaan jasa lainnya dan pengadaan barang masing-masing sebanyak 3 paket atau 1,33 persen.

Tabel. 2.3.

**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Tahun 2019-2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa yang memenuhi kaidah Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Persentase Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	2019	100	96,96	96,96
			2020	100	93,00	93,00
			2021	100	97,11	97,11
			2022	100	99,12	99,12

Ket: diolah dari data laporan kinerja tahunan

Dari Tabel 2.3. dijelaskan hasil tender/seleksi yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Pengadaan barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019-2022 telah berjalan efektif yaitu hasil capaian tender/seleksi menunjukkan keberhasilan penyelesaian proses tender diatas 90% dimana dari dokumen tender yang diproses dapat diselelsikan, dan rata-rata 3,5% adalah gagal tender. Terjadinya gagal tender dipengaruhi oleh keterlambatan SKPD dokumen tender dan dalam tahapan proses pemilihan terjadi gagal tender dan tidak memungkinkan untuk dilakukan tender ulang mengangat dari perhitungan waktu tender dan waktu pengerjaan tidak dapat diselesaikan.

Hasil capaian pelaksanaan tender berdasarkan dokumen yang di proses terhadap tender /seleksi selesai dan gagal tender sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perbandingan Capaian Kinerja Pelaksanaan Tender/Seleksi
Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Tender/Seleksi (Paket)	Jumlah tender selesai (Paket)	Capaian (%)	Tender Gagal (Paket)
2019	460	446	96,96	14
2020	357	332	92,99	25
2021	104	101	97,11	3
2022	228	226	99,12	2
Total	1149	1105	96,17	44

Ket: diolah dari data laporan kinerja tahunan

Dari tabel 2.4. terlihat bahwa dari tahun 2019-2022 jumlah dokumen tender/seleksi atas paket pekerjaan SKPD yang berproses di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebanyak 1.149 paket dan sebanyak 1.105 paket selesai di proses atau 96,17 persen. Dari 1149 paket tender sebanyak 44 paket tender gagal dengan alasan dalam proses pemilihan tidak ada peserta yang memasukan dokumen penawaran, peserta yang memasukan penawaran tidak lulus kualifikasi admintrasi, teknis, dan harga serta waktu yang tidak mencukupi untuk dilakukan tender ulang terhadap paket pekerjaan yang ditender ulang

Tabel 2.5.

**Tender/Seleksi Selesai Per SKPD
Berdasarkan Jenis Pengadaan Tahun 2022**

NO	SKPD	Jumlah Paket Per Kategori Pengadaan (Paket)					Jumlah
		Konstruksi	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	Jasa Lainnya	Pengadaan Barang	
1	Dinas PUPR	75	76	22	0	1	174
2	Dinas Perhubungan	10	6	0	0	1	17
3	Dinas Energi dan Sumberdaya Minera	0	1	1	0	0	2
4	Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah	21	0	0	0	0	21
5	Dinas Olah Raga dan Pemuda	0	0	0	1	0	1
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	4	0	0	0	0	4
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0	0	1	1
8	Dinas Pertanian dan Pangan	0	0	0	1	0	1
9	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3	0	0	0	0	3
10	Biro Umum dan Protokol	1	0	0	0	0	1
11	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua	0	0	0	0	1	1
JUMLAH		114	83	23	3	3	226

Pada tabel 2.5. menunjukkan total 226 paket tender/seleksi selesai berasal dari 10 SKPD dilingkungan Provinsi Papua dan 1 dari Saker Kanwil Ditjend Perbendaharaan Provinsi Papua, jumlah paket terbanyak yaitu Dinas PUPR sebanyak 174 paket, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah 21 Paket, dan Dinas Perhubungan 17 Paket.

Tabel 2.6.

Realisasi Pelaksanaan Tender/Seleksi Terbatas Bagi Pelaku Usaha Papua Per Jenis Pengadaan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Paket Tender/Seleksi Selesai	Persen Terhadap Total
1	2	3	4
1	Pekerjaan Konstruksi	22	88
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	2	8
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	1	4
4	Jasa Lainnya	0	0
5	Pengadaan Barang	0	0
JUMLAH TOTAL		25	100

Pada tabel 2.6. menunjukkan jumlah pelaksanaan tender terbatas bagi pelaku usaha orang asli Papua sesuai amanat Perpres 17 Tahun 2019, Perpres 12 Tahun 2021 dan Peraturan

Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 sebanyak 25 paket dari total 226 paket keseluruhan tender/seleksi selesai atau 11,11 persen.

Tabel 2.7.

Realisasi Tender/Seleksi Gagal Per Jenis Pengadaan
Tahun 2022

No	Uraian	Tender/ Seleksi Gagal	Keterangan
1	2	3	4
1	Pekerjaan Konstruksi	1	Paket Pembangunan Dermaga danau sentani Toware di Kabupaten Jayapura Tender Gagal disebabkan Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran/ Waktu tidak cukup untuk tender ulang.
2	Pengadaan Barang	1	Paket Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura disebabkan Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.
	JUMLAH	2	

Dari tabel 2.7. dapat dijelaskan bahwa selama pelaksanaan tender/seleksi oleh Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 terdapat 2 paket pekerjaan yang gagal tender yaitu :

1. Paket Pembangunan Dermaga danau sentani Toware di Kabupaten Jayapura.

Tender dilaksanakan dengan jadwal proses pemilihan tanggal 7 Oktober s.d 26 Oktober 2022 dan dinyatakan gagal tender disebabkan Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran/ Waktu tidak cukup untuk tender ulang.

2. Paket Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura.

Tender dilaksanakan dengan jadwal proses pemilihan Tanggal 7 Nopember s.d 24 Nopember 2022 dan dinyatakan tender gagal disebabkan Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan dan tidak dapat dilanjutkan karena waktu pemilihan yang tidak cukup untuk proses tender ulang.

- b. Persentase efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan PBJ.

Tabel 2.8.
Penghematan Anggaran Tahun 2022

NO	URAIAN	HPS	NILAI KONTRAK	PENGHEMATAN	(%)
1	2	3	4	5=(3-4)	6 = (5/3 x 100)
1	Pekerjaan Konstruksi	1.546.798.718.482,93	1.405.771.745.349,72	141.026.973.133	9,12
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	45.633.158.104,08	41.891.412.101,97	3.741.746.002	8,20
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	13.109.183.666,00	12.287.341.823,50	821.841.843	6,27
4	Jasa Lainnya	120.860.110.800,00	120.475.866.960,00	384.243.840	0,32
5	Pengadaan Barang	13.694.898.916,71	12.953.320.644,97	741.578.272	5,41
	JUMLAH	1.740.096.069.970	1.593.379.686.880	146.716.383.090	8,43

Dari Tabel 2.7. dapat dijelaskan bahwa dari target capaian indikator efisiensi anggaran pelaksanaan pemilihan pengadaan barang dan jasa tahun 2022 sebesar 5 persen terealisasi 8,43% atau realisasi antara target sebesar 168,6 persen dan menunjukan capaian dengan kategori “sangat berhasil”. Efisiensi anggaran tertinggi sampai terendah yaitu paket tender konstruksi sebesar 9,12 persen, jasa konsultansi badan usaha konstruksi sebesar 8,20 persen, jasa konsultansi badan usaha non konstruksi 6,27 persen, pengadaan barang 5,41 persen dan jasa lainnya 0,32 persen. Dibandingkan dengan hasil efisiensi anggaran pelaksanaan tender/seleksi tahun 2021 hanya sebesar 3,04 persen dari target 6% lebih rendah dari efisiensi anggaran tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan proses pelaksanaan tender/seleksi berjalan dengan baik yaitu dengan adanya proses negosiasi harga oleh Pokja Pemilihan.

Tabel 2.9.
Capaian Kinerja Efisiensi Anggaran Pelaksanaan
Tender/Seleksi Pengadaan Barang/Jasa
Tahun 2020, 2021 dan 2022

Tahun	Total HPS	Total Penghematan	Capaian (%)
2020	2.740.154.880.318,96	150.571.691.209,35	5,5
2020	2.117.698.528.303	134.423.064.147	6,35
2021	1.772.455.658.798	53.837.187.702	3,04
2022	1.740.096.069.970	146.716.383.090	8,43
Total	8.370.405.137.389,96	485.548.326.148,35	5,80

Dari tabel 2.9. capaian penghematan tahun 2019 sebesar 5,5%, tahun 2020 sebesar 6,35% dari target 6%, penghematan tahun 2021 sebesar 3,04% dan penghematan tahun 2022 sebesar 8,43%.

2. Sasaran strategis 2. Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara elektronik.

Sasaran strategis 2 terdiri dari 1 indikator yaitu :

a. Persentase Penggunaan SPSE dan Aplikasi lokal PBJ oleh SKPD.

Dari target capaian indikator sebesar 100% tercapai 100,00%. dapat dijelaskan dari 35 SKPD atau 79 satker di Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penginputan RUP baik melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP LKPP) dan Aplikasi Lokal Pemerintah Provinsi Papua yaitu Aplikasi sistem informasi pengadaan pada website www.Singa2.Papua.go.id. Kondisi penginputan RUP sebagai syarat wajib bagi Pengguna Anggaran untuk menyusun dan mengumumkan RUP dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan Trend positif. Dibandingkan dengan tahun 2021

SKPD yang menginput dan mengumumkan RUP hanya sebanyak 30 SKPD dari 35 SKPD.

Jumlah Rencana Umum Pengadaan yang diinput dan diumumkan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP (SiRUP LKPP) sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.10.

Rekapitulasi Penginputan RUP Kategori Penyedia Tahun 2022

Metode	RUP APBD Induk	RUP APBD Perubahan
Pengadaan Langsung	2408	3229
e-Purchasing	49	72
Seleksi	140	140
Penunjukan Langsung	50	64
Tender	168	166
Tender Cepat	0	0
Dikecualikan	7	23
TOTAL	2822	3694

Ket : Data diolah dari <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/>

Jumlah RUP SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 yang diinput pada aplikasi SiRUP Nasional sebanyak 2.822 paket pada APBD Induk dan bertambah menjadi 3.694 paket pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.11.

**Rekapitulasi Perbandingan Data RUP Kategori Penyedia
Tahun 2020, 2021 dan 2022**

Metode	RUP Kategori Penyedia		
	2020	2021	2022
Pengadaan Langsung	3308	1931	3229
e-Purchasing	226	107	72
Seleksi	247	23	140
Penunjukan Langsung	223	156	64
Tender	218	107	166
Tender Cepat	21	7	0
Dikecualikan	0	0	23
TOTAL	4.243	2.331	3.694

Ket : Data diolah dari <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/>

Tabel 2.12.
Rekapitulasi Data RUP Per SKPD/Satker
Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Penyedia		Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
1	Badan Kepegawaian Daerah PA/KPA	128	5.623	86	49.490	214	55.114
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PA/KPA	67	2.045	34	12.228	101	14.273
3	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama PA/KPA	68	2.884	57	13.011	125	15.896
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah PA/KPA	164	60.499	90	3.541.002	255	3.601.501
6	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah PA/KPA	78	36.676	32	104.945	110	141.621
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PA/KPA	165	16.011	85	39.126	251	55.137
8	Badan Penghubung Daerah PA/KPA	20	6.767	79	13.981	99	20.749
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PA/KPA	217	29.929	138	127.069	362	156.999
10	Biro Hukum PA/KPA	37	19.868	49	29.693	90	49.561
11	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa PA/KPA	104	7.496	63	39.642	167	47.138
12	Biro Organisasi PA/KPA	61	3.798	39	21.595	100	25.393
13	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus PA/KPA	20	32.609	0	0	20	32.609
14	Biro Umum dan Protokol PA/KPA	155	113.363	68	83.675	223	197.039
15	BPTH Papua PA/KPA	21	566	36	1.433	57	1.999
16	Cabang Dinas Kehutanan Asmat PA/KPA	10	176	10	650	20	826
17	Cabang Dinas Kehutanan Boven Digoel PA/KPA	11	1.209	9	705	20	1.914
18	Cabang Dinas Kehutanan Dogiyai Deyai PA/KPA	3	351	2	261	5	612
19	Cabang Dinas Kehutanan Intan Jaya PA/KPA	2	138	3	461	5	599
20	Cabang Dinas Kehutanan Jayapura PA/KPA	7	1.350	11	966	18	2.316
21	Cabang Dinas Kehutanan Keerom PA/KPA	9	730	25	869	34	1.600
22	Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya PA/KPA	5	226	10	373	15	599
23	Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Tengah PA/KPA	1	216	3	483	4	699
24	Cabang Dinas Kehutanan	7	1.199	5	2.030	12	3.229

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

	Mappi PA/KPA						
25	Cabang Dinas Kehutanan Merauke PA/KPA	9	1.432	3	2.326	12	3.759
26	Cabang Dinas Kehutanan Mimika PA/KPA	12	382	4	644	16	1.026
27	Cabang Dinas Kehutanan Nabire PA/KPA	6	112	5	738	11	850
28	Cabang Dinas Kehutanan Paniai PA/KPA	3	170	1	429	4	600
29	Cabang Dinas Kehutanan Puncak PA/KPA	5	410	2	139	7	550
30	Cabang Dinas Kehutanan Puncak Jaya PA/KPA	2	188	1	361	3	549
31	Cabang Dinas Kehutanan Sarmi PA/KPA	1	71	18	777	19	849
32	Cabang Dinas Kehutanan Tolikara PA/KPA	5	281	2	317	7	599
33	Cabang Dinas Kehutanan Yahukimo PA/KPA	4	294	3	305	7	599
34	Cabang Dinas Kehutanan Yalimo PA/KPA	1	91	2	408	3	500
35	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral PA/KPA	102	24.049	48	42.185	150	66.235
36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PA/KPA	129	4.954	99	57.986	231	62.941
37	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup PA/KPA	179	22.202	200	143.224	379	165.426
38	Dinas Kelautan dan Perikanan PA/KPA	75	34.697	154	34.590	229	69.287
39	Dinas Kesehatan PA/KPA	109	88.865	727	73.988	839	162.853
40	Dinas Komunikasi dan Informatika PA/KPA	28	42.309	13	25.070	41	67.380
41	Dinas Olah Raga dan Pemuda PA/KPA	9	51.149	34	59.843	43	110.993
42	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PA/KPA	260	2.420.378	0	0	261	2.420.378
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua PA/KPA	5	1.578	34	32.048	39	33.627
44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PA/KPA	19	1.818	50	14.647	75	16.466
45	Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah PA/KPA	587	460.291	531	975.021	1124	1.435.312
46	Dinas Perhubungan PA/KPA	45	88.398	90	38.386	135	126.785
47	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja PA/KPA	98	2.296	52	63.847	150	66.143
48	Dinas Pertanian dan Pangan PA/KPA	13	3.752	8	86.769	21	90.521

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

49	Dinas Sosial Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PA/KPA	14	5.888	24	46.673	39	52.562
50	Inspektorat PA/KPA	79	8.470	79	72.564	158	81.035
51	KPHL UNIT II NABIRE PA/KPA	3	152	1	347	4	500
52	KPHL Unit VI Mimika PA/KPA	8	345	4	554	12	899
53	KPHL Unit XLII A Jayawijaya PA/KPA	9	866	6	633	15	1.500
54	KPHL Unit XLII B Lanny Jaya PA/KPA	6	290	1	309	7	599
55	KPHL Unit XX Biak PA/KPA	15	1.305	5	1.082	20	2.388
56	KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang PA/KPA	6	870	6	783	12	1.654
57	KPHP Unit LIII Boven Digoel PA/KPA	12	415	6	584	18	999
58	KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen PA/KPA	6	330	3	269	9	599
59	KPHP Unit XLIII Nduga PA/KPA	1	120	3	479	4	599
60	KPHP Unit XVII Waropen PA/KPA	5	298	1	451	6	749
61	KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya PA/KPA	3	460	3	540	6	1.000
62	KPHP Unit XXIII Sarmi PA/KPA	9	195	9	504	18	699
63	KPHP Unit XXIX Keerom PA/KPA	1	33	2	567	3	600
64	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura PA/KPA	13	1.076	2	522	15	1.599
65	Rumah Sakit Jiwa PA/KPA BLU	27	12.080	46	39.793	73	51.873
66	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura PA/KPA	61	35.738	32	143.244	93	178.982
67	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura BLUD PA/KPA BLU	5	15.310	2	75.713	7	91.024
68	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura PA/KPA	110	123.957	70	189.230	247	313.188
69	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura BLUD PA/KPA BLU	28	64.197	30	76.239	68	140.436
70	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah PA/KPA	87	5.081	24	41.721	111	46.803
71	Sekretariat Daerah PA/KPA	17	8.385	18	1.207.629	35	1.216.015
72	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua PA/KPA	60	31.233	93	448.717	153	479.950
73	Sekretariat Majelis Rakyat Papua PA/KPA	19	5.486	51	150.881	70	156.367

74	UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi PA/KPA	2	9	1	290	3	299
75	UPTD Balai Latihan Koperasi dan UKM PA/KPA	8	862	2	1.147	10	2.009
76	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Normalisasi Produk Industri PA/KPA	2	131	1	168	3	299
77	UPTD Kebun Raya Koya Koso PA/KPA	2	324	5	675	7	1.000
78	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua PA/KPA	0	0	6	499	6	499
79	UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek PA/KPA	9	311	2	688	11	999
	Jumlah	3694	3.918.113	3.553	8.241.231	7.356	12.159.375

Ket : Data diolah dari <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/>

Tabel 2.12. Menunjukkan total jumlah paket yang diinput dan diumumkan pada aplikasi Sirup Nasional Tahun 2022 sebanyak 7.356 paket yang terdiri dari 3.694 paket kategori penyedia dan 3.553 paket. Total anggaran RUP sebanyak Rp. 12.159.375.000.000,- (Dua belas trilyun seratus lima puluh sembilan juta tga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terdiri dari RUP penyedia Rp. 3.918.113.000.000,- (Tiga trilyun sembilan ratus delapan belas juta seratus tiga belas juta rupiah) dan kategori swakelola Rp. 8.241.231.000.000,- (Delapan trilyun dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Tabel 2.13.

**Capaian Kinerja Penginputan RUP
Tahun 2020 , 2021 dan 2022**

Tahun	Sasaran SKPD yang menginput RUP		Capaian (%)
	Jumlah Satker	Jumlah Satker Menginput RUP	
2020	35	20	57,15
2021	35	31	88,57
2022	35	36	100,00

Tabel 2.13. dapat dijelaskan bahwa tahun 2022 penginputan RUP oleh 35 SKPD terealisasi sebanyak 35 SKPD atau tercapai 100% dengan capaian kinerja “Sangat Baik”

Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa ditahun 2022 Pengguna Anggaran telah memahami kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres 12/2021 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang mana kewajiban PA adala menetapkan dan mengumumkan RUP.Teralisasinya penginputan RUP didukung dengan dibangunnya Aplikasi Lokal Pemerintah Provinsi Papua yaitu Aplikasi sistem informasi pengadaan pada website www.Singa2.Papua.go.id. Yang akan diditarik ke Sirup LKPP.



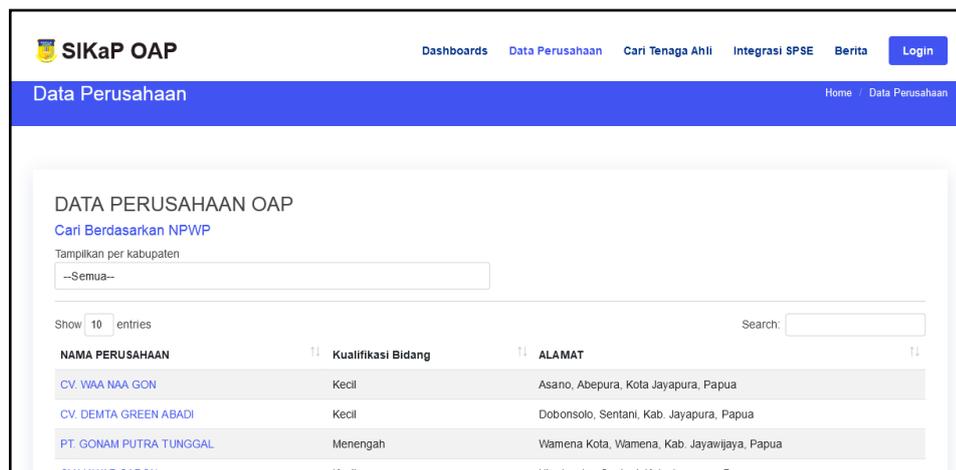
Gbr. 2.1. Tampilan aplikasi lokal Pemerintah Provinsi Papua

<https://singa2.papua.go.id/>.

Selain aplikasi <https://singa2.papua.go.id/>, Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi Papua juga membangun aplikasi pendataan pelaku usaha Papua yang dapat diakses pada <https://sikap-oap.papua.go.id/> dengan maksud dapat mengetahui data jumlah perusahaan pelaku usaha Orang Asli Papua.

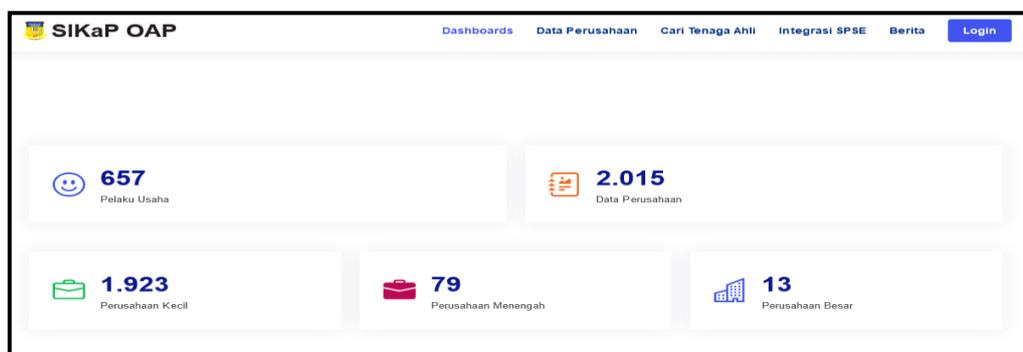


Gbr. 2.2. Tampilan aplikasi lokal Pemerintah Provinsi Papua



Gbr. 2.3. Tampilan data perusahaan pada aplikasi

Data pelaku usaha Orang Asli Papua yang terdaftar pada Aplikasi SiKAP-OAP tahun 2019-2022 dijelaskan pada data berikut :



Gbr. 2.4. Data pelaku usaha OAP yang terdaftar pada Aplikasi SiKAP OAP Tahun 2019-2022

3. Sasaran strategis 3. Meningkatnya Profesional SDM pengelola PBJ

Capaian sasaran ini sebesar 98,68 persen “sangat berhasil”.

Pencapaian sasaran strategis 3 terdiri 3 indikator yaitu :

a. Persentase keterisian Jabatan Fungsional Pengelola PBJ.

Sesuai amanat Pasal 74A ayat (2) dan Pasal 74B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 secara jelas menyebutkan bahwa Pemda wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang Jasa berupa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan wajib menyusun rencana aksi Pemenuhan Pengelola PBJ. Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2021 pada Pasal 5 ayat (2) terkait dengan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ sekurang-kurangnya sudah harus mencapai 60% pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) hingga 31 Desember 2023.

Dari target capaian tahun 2022 sebesar 60% keterisian Jafung PPBJ yaitu target 35 orang dari quota LKPP 59 orang terealisasi sebanyak 34 orang atau 57,63%. Persentase capaian dari target 35 orang terpenuhi 34 orang atau sebesar 96,04 persen. Kondisi existing sampai dengan Tahun 2021 telah dilantik 20 orang JFT PPBJ, dan pada tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022 dilantik sebanyak 10 orang JFT PPBJ dan sebanyak 3 orang telah lulus ujian kompetensi ahli fungsi jabatan dan masih menunggu proses pelantikan. Jumlah keterisian JFT PPBJ sampa dengan Tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.14.
Jumlah Keterisian JFT PPBJ
Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Jenjang JFT PPBJ	Tahun				Ket
		2020	2021	2022	Jumlah	
1	Madya	-	3	1	4	
2	Muda	-	14	6 + 2*	22	*2 Lulus belum dilantik
3	Pertama	-	3	3 + 2*	8	2 Lulus belum dilantik
	Total	-	20	14	34	

Tabel 2.15.
ASN Lulus Pengangkatan JFT PPBJ Melalui Perpindahan Dari
Jabatan Lain Dan Sedang Dalam Proses Pelantikan

NO.	Jenjang JF PPBJ	Nama Peserta	Asal SKPD
1	Muda	Adi Yuwono	Biro PBJ
2	Pertama	Gemayel Richard Kambuaya	Biro PBJ -
3	Pertama	Yulianus Duwit	Dinas Perikanan & Kelautan
4	Pertama	Evet Nobertus Pekei	BPSDMP

Pada tabel 2.14 dan 2.15 dapat dijelaskan jumlah ASN yang lulus JFT PPBJ Melalui Perpindahan dari jabatan lain Tahun 2022 dan belum dilantik/sedang dalam Proses Pelantikan sebanyak 4 orang yaitu 1 3 orang JFT Pertama dan 1 orang JFT Muda. Dari 4 orang JFT tersebut sebanyak 2 orang dari internal Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dan 2 orang dari Luar Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.



Gbr. 2.5. Pelantikan 10 ASN JFT PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lainnya tanggal 20 Juni 2022

b. Tingkat Capaian Kematangan UKPBJ

Hasil capaian tingkat kematangan UKPBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua tahun 2022 telah mencapai level proaktif (level 3) yaitu dengan telah memenuhi kelengkapan atribut untuk mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) pada seluruh variabel tingkat kematangan UKPBJ (9/9) di tanggal 31 Oktober 2022. Bukti capaian Pemerintah Provinsi Papua telah mencapai tingkat kematangan capaian tingkat kematangan level 3 yaitu melalui surat kepala LKPP Nomor: 27971/KA/11/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.16.

**Hasil Capaian Tingkat Kematangan Organisasi
UKPBJ Provinsi Papua Tahun 2022**

Hasil Pengisian Penilaian Mandiri
Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ
PROVINSI PAPUA

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	File Bukti Dukung
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.2 Manajemen Penyedia	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.3 Manajemen Kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.4 Manajemen Risiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ, siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	2.2 Tugas dan Fungsi	Pendampingan perencanaan pengadaan, Proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak, Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ, Pembinaan SDM PBJ, Layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
SDM	3.1 Perencanaan SDM	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
	3.2 Pengembangan SDM	Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Dari 542 PEMDA yang baru mencapai lever kematangan 9/9 (Proaktif) baru 63 PEMDA dan salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Papua seperti terlihat pada tabel berikut :

c. Persentase Sanggahan/ pengaduan yang terselesaikan.

Hasil Capain indikator ini yaitu jumlah sanggahan yang terselesaikan sebesar 100% dari target yang ditetapkan atau capaian kinerja “Sangat Baik”Jumlah paket tender yang disanggah sebanyak 20 paket tender dengan 22 sanggahan dari peserta tender. Sanggahan yang diajukan oleh peserta tender/seleksi 100% terjawab oleh pokja dan Bagian Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua. Data Jumlah sanggahan pada proses pelaksanaan pemilihan PBJ seperti tabel berikut :

Tabel 2.17.

Jumlah Paket Tender dan Jumlah Sanggahan Per Jenis
Pengadaan Tahun 2022

Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Jumlah Sanggahan	%
Barang	3	0	0
Konstruksi	114	11	9,65
Jasa Konsultansi	106	8	7,55
Jasa Lainnya	3	1	33,33
Total	226	20	8,85

Dari total 226 paket tender/seleksi selesai sebanyak 20 paket yang disanggah atau 8,85 persen. Perbandingan persentase antara jumlah sanggahan terhadap jumlah paket per jenis pengadaan yaitu pada paket seleksi jasa lainnya sebesar 33,33%, Konstruksi 9,65% Jasa Konsulnasi 7,55% dan paket jenis pengadaan barang tidak terdapat sanggahan oleh peserta tender/seleksi.

Sanggahan yang disanggahkan oleh peserta terhadap Pokja Pemilihan dapat dijawab oleh Pokja dan tidak menghentikan proses tender/seleksi.

Tabel 2.18.

**Sanggahan dari Peserta Tender/Seleksi
Tahun 2020,2021 dan 2022**

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PAKET YANG DITENDER					JUMLAH PAKET YANG DISANGGAH					JUMLAH SANGGAHAN / JENIS PEKERJAAN / PAKET					PERSENTASE SANGGAHAN TERHADAP JUMLAH PAKET TENDER
	BARANG	KONSTRUKSI	KONSULTANSI	JASA LAINNYA	JUMLAH	BARANG	KONSTRUKSI	KONSULTANSI	JASA LAINNYA	JUMLAH	BARANG	KONSTRUKSI	KONSULTANSI	JASA LAINNYA	JUMLAH	
2020	25	138	212	13	388	3	22	32	2	59	3	22	32	2	59	15,21
2021	12	60	33	7	112	3	12	0	1	16	7	18	0	1	26	14,29
2022	3	114	106	3	226	0	11	8	1	20	0	12	8	2	22	8,85

4. Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Biro PBJ Prov.Papua

Sasaran strategis 4 terdiri 1 indikator yaitu : Hasil SAKIP Biro PBJ Setda Prov.Papua

Hasil capaian penilaian SAKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan bisa mencapai nilai BB. Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat Tahun 2021 dengan kategori BB, dan berdasarkan catatan dan rekomendasi oleh APIP telah dilakukan perbaikan-perbaikan dan diharapkan untuk peniaian SAKIP Tahun 2022 minimal kategori BB dan maksimal dapat mencapai penilaian kategori A.

Tabel 2.19.

Nilai SAKIP Tahun 2019, 2020,2021 dan 2022

Tahun	Nilai SAKIP	Kategori	Interprestasi
2019		CC	Cukup
2020	69,03	B	Baik
2021	72,26	BB	Sangat Baik
2022 (target)	75	BB	Sangat Baik

Ket :Hasil Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat

1.1. Pengukuran Realisasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.

Hasil capaian Program /kegiatan/Sub Kegiatan dalam mendukung sasaran kinerja Biro Pengadaan barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022 yang terdiri dari 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kebijakan Dan Pelayananan Pengadaan Barang Dan Jasa. Capaian program penunjang urusan pemerintah daerah dari 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan dan program kebijakan dan pelayananan pengadaan barang dan jasa yaitu 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.20.

**Realisasi Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	OUTPUT		
			TARGET	REALISASI	Persen Capaian
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				97,75
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 	Tersusunnya Dokumen Perencanaan daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
	<ul style="list-style-type: none"> Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD 	Terlaksananya kordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi keuangan dan penataan SPJ keuangan Biro PBJ yang akuntable	1 laporan		100
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan SKPD 	Terbayarnya gaji dan Tunjangan Pegawai Biro PBJ Tahun 2022	1 Tahun	1 Tahun	100
	<ul style="list-style-type: none"> Kordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun 	Tersusunnya Laporan Keuangan Biro PBJ tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100
	c. Kegiatan Administrasi Kepegawain perangkat daerah				96,48
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut kelengkapannya 	Tersedianya Pakaian dinas Pegawai Biro PBJ	3 jenis	3 Jenis	100
	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan pegawai 	Jumlah aparatur	o Diklat	2 org	10

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

	berdasarkan tugas dan fungsi	yang mengikuti Diklat/Bimtek	Latsar 2 org o Bimtek PBJ 37 org	37 org	0 10 0
	d. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah				
	• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	23 unit	18 Unit	78,26
	• Penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan	o Jumlah cetakan	8 jenis	8 Jenis	100
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	o Tersedianya bahan bacaan/langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100
	• Penyediaan Bahan/material	Jumlah jenis bahan/material habis pakai kantor (ATK)	2 jenis	2 Jenis	100
	• Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum kegiatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
	• Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Kordinasi/Konsultasi luar dan dalam daerah	3 kegiatan	3 Kegiatan	100
	e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91,67
	• Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terlaksananya layanan penunjang administrasi urusan kantor o Terbayarnya Honor PPTK o Tersedianya materi	4 org 10.000 lbr	4 org 10.000 lbr	100 100
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor umum	o Jumlah pendamping Hukum PBJ o Jumlah tenaga non ASN/honorer kantor / tenaga layanan umum keamanan dan kebersihan kantor o Jasa penyusunan Juknis Pergub, Naskah Akademik Raperdasus dan Jasa pendamping hukum PTUN	2 orang 31 org 3 Kegiatan	2 Orang 31 Orang 3 Kegiatan	100 100 100
	f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah				99,97
	• Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Jumlah penyediaan BBM kendaraan dinas	45.000 ltr	44.969 ltr	99,93

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan aset tetap lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Sewa gudang Pemeliharaan kendaraan Pemeliharaan mesin foto copy Pemeliharaan Ac Persediaan alat listrik Pemeliharaan komputer 	<p>1 unit</p> <p>5 unit</p> <p>3 unit</p> <p>20 unit</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket/tahun</p>	<p>1 Unit</p> <p>5 Unit</p> <p>3 Unit</p> <p>20 Unit</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket /Tahun</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
2	PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				100
	a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya penyusunan dokumen Survey harga pasar Tersusunya laporan pelaksanaan pengadaan e-katalog, bela pengadaan, P3DN Terlaksana sosialisasi e-katalog, bBela Pengadaan dan P3DN 	<p>1 dokumen</p> <p>1 laporan</p> <p>1 laporan</p>	<p>1 dokumen</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Terbayarnya Insentif Pengelola PBJ Tersusunnya data base vendor/hasil kaji ulang dan hasil tender Tersusunnya Laporan Standar Satuan Harga 	<p>10 Bulan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>	<p>10 Bulan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan barang dan Jasa 	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tender, Pengadaan Langsung dan hasil penghematan anggaran terhadap proses PBJ	1 Laporan	1 Laporan	100
	b. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya pemanfaatan layanan SPSE pengadaan secara elektronik			100

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sistem secara elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terbayarnya Insentif Pengelola LPSE ○ Terlaksananya blmtek Aplikasi SPSE versi 4.5 ○ Terlaksananya pelatihan penginputan RUP ○ Teraksananya pelatihan verifikator SIKAP-OAP per wilayah adat 	10 Bulan	10 Bulan	100
			1 Laporan	1 Laporan	100
			1 Laporan	1 Laporan	100
			1 laporan	1 Laporan	100
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa 	Jumlah layanan aplikasi sistem informasi yang terpelihara	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa 	Data informasi pengadaan barang dan jasa yang terpublis	1 Laporan	1 Laporan	100
	c. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Meningkatnya SDM PBJ dan Penyelesaian sanggahan PBJ			100
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Sumberdaya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terlaksananya peningkatan SDM melalui Diklat Jafung PPBJ ○ Terlaksannya penilaian angka kredit bagi JFT PPBJ ○ Penyusunan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ pada Biro PBJ 	1 Laporan	1 Laporan	100
			1 Laporan	1 Laporan	100
			1 Laporan	1 Laporan	100
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jumlah Pembinaan kelembagaan UKPBJ ○ Pencapaian Variabel tingkat kematangan 	1 kali	1 Kali	100
			Level 3	Level 3	100
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bimtek Aspek Hukum PBJ ○ Jumlah sanggahan peserta tender/seleksi yang terselesaikan 	1 Laporan	1 Laporan	100
			1 Laporan	1 Laporan	100
		Rata-Rata Capaian			99,56

Dari tabel 2.20. bahwa rata-rata capaian realisasi fisik pelaksanaan program tahun 2022 sebesar 99,56% yang terdiri dari realisasi program

penunjang urusan daerah sebesar 99,13% dan realisasi program kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa sebesar 100%. Rincian realisasi kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan rincian belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN DAERAH

Program ini terdiri dari 6 Kegiatan dan 17 Sub kegiatan dengan realisasi fisik sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Rata-rata realisasi kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen perencanaan, dan penganggaran serta evaluasi kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dengan nilai Capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Rata-rata pencapaian realisasi kegiatan dipengaruhi oleh capaian 2 sub kegiatan yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

Hasil pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan yaitu tersusunnya 2 dokumen perencanaan yaitu Renja dan RKA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi capaian 100% sub output kegiatan didukung dengan tercapainya realisasi belanja yaitu:

- Pembayaran Honorarium tim Penyusunan Renja dan RKA.
- Cetak dokumen.
- Makan minum pelaksanaan penyusunan
- Perjalanan dinas rapat dan kordinasi penyusunan dokumen perencanaan.

b. Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Hasil pelaksanaan kordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yaitu tersusunnya dokumen perencanaan RKA Tahun

2023 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi capaian 100% sub output kegiatan ini didukung dengan tercapainya realisasi belanja yaitu:

- Pembayaran Honorarium tim Penyusunan RKA 2023
- ATK penyusunan
- cetak dokumen RKA
- Makan minum pelaksanaan rapat kordinasi dan penyusunan, dan
- Transport lokal pelaksanaan kordinasi dan rapat pembasan dan penyusunan RKA.

2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan kordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Capaian realisasi kegiatan ini didukung oleh terealisasinya capaian 2 sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan sKPD

Capaian realisasi fisik sebesar 96,93%. Capaian sub kegiatan ini terdiri meliputi :

- Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai sebanyak 71 orang selama 12 bulan dan 1 bulan gaji ke-13.
- Terbayarnya tambahan penghasilan 11 bulan dari target 12 bulan atau sebesar 91,67% dikarenakan tidak terbayarnya 1 bulan tambahan penghasilan untuk Bulan Desember tahun 2022 dan direncanakan dibayarkan pada Tahun 2023.

- b. Kordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100%.
Capaian sub kegiatan ini meliputi :
- Pembayaran honor penyusunan laporan
 - Cetak laporan
 - Trasport lokal kordinasi penyusunan laporan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100%.

Capaian realisasi ini terdiri atas realisasi 2 sub kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu tersedianya 3 jenis pakaian bagi ASN dan Non ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua yaitu :

- Pakain Dinas Keki sebanyak 95 stell
- Pakain dinas Korpri sebanyak 95 stell dan
- Pakaian lapangan/taktikal sebanyak 95 stell

b. Pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu terlaksananya keikutsertaan 39 aparatur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yaitu terdiri dari :

- Diklat Latsar CPNS sebanyak 2 orang atas nama Timotius dan Amsal Suebu.
- Bimbingan teknis pengembangan kapasitas Aparatur Bagi Pokja pemilihan PPBJ, pejabat struktural dan staf sebanyak 37 orang yang dilaksanakan di Makasar Sulawesi Selatan tanggal 28-29 Nopember 2022 dengan materi Bimbingan teknis penerapan kebijakan TKDN pada PBJ Pemerintah yang diselenggarakan oleh Firma KM & Patner.

4. Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah

Rata-rata hasil capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 96,38% terdiri dari capaian realisasi fisik 3 sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 78,26%. Kondisi capaian ini disebabkan dari target 23 unit peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan terealisasi sebanyak 18 unit dan sebanyak 5 unit tidak terealisasi:

18 unit peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi yaitu :

- UPS kantor sebanyak 13 unit
- Brankas 1 unit
- Sound sistem 1 unit/paket
- Mesin Foto copy 1 unit
- Laptop 1 unit
- Computer PC all in one 1 unit.

Sebanyak 5 unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak terealisasi yaitu :

- Hardisk eksternal 3 unit
- Scanner 2 unit

b. Penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu teralisasinya cetak dokumen administrasi kantor yaitu :

- Cetak map dinas
- Cetak baner/baliho
- Cetak dan penggandaan SPJ
- Cetak dokumen hasil tender
- Cetak spanduk informasi publik
- Cetak laporan tahunan, LPPD dan laporan kinerja SKPD dan
- Cetak dokumen kepegawain.

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu dengan terlaksananya langganan surat kabar Cepas selama 12 bulan.

d. Penyediaan Bahan/material.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu dengan terealisasinya pengadaan :

- Alat tulis kantor Biro Pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 paket
- Tinta laser jet dan toner sebanyak 275 buah
- Tinta printer epon sebanyak 600 buah

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu dengan terealisasinya penyediaan makan dan minum kegiatan pelaksanaan PBJ dan makan minum rapat yang terdiri dari:

- Penyediaan makan dan minum kegiatan pelaksanaan PBJ 12 bulan sebanyak 16.128 porsi.
- Penyediaan makan minum rapat 1000 porsi.

f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu terlaksananya :

- Perjalanan dinas dalam rangka kordinasi/konsultasi dan pembuktian lapangan dalam mendukung pelaksanaan tender/seleksi pengadaan barang dan jasa.
- Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kordinasi dan rapat.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100%. Realisasi terdiri atas capaian realisasi sub kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi sub kegiatan tersebut sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa Surat Menyurat.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu dengan terbayarnya honor PPTK dan tersedianya administrasi surat menyurat dengan penjelasan sebagai berikut :

- Terbayarnya honor 4 orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selama 10 bulan.
- Tersedianya administrasi surat menyurat berupa penyediaan materai sebanyak 5.000 buah

b. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 83,33%. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa komponen yang terealisasi dan komponen yang tidak terealisasi. Komponen-komponen tersebut sebagai berikut :

Komponen yang teralisasi 100% yaitu :

- Terlaksannya penyusunan Juknis Pergub Papua nomor 46 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua.
- Terbayarnya honor tenaga honorer pengelola PBJ dn LPSE sebanyak 18 orang selama 12 bulan.
- Tersedianya bahan kebersihan kantor.
- Tersedianya makan dan minum jaga malam keamanan kantor.
- Terbayarnya jasa pengamanan satgas Papeda 5 orang selama 12 bulan.
- Terbayarnya jasa pendamping hukum atas pengaduaan di PTUN.

- Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua kerjasama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dengan Universitas Papua Manokwari.
- Terbayarya honor jasa pendamping hukum sebanyak 2 orang dari target 2 orang.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99,97% yang terdiri dari capaian realisasi 2 sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 99,93 % disebabkan karena dari target 45.000 liter BBM kendaraan dinas terealisasi sebanyak 44.969 liter.

b. Pemeliharaan aset tetap lainnya.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100%.

Realisasi fisik kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Sewa gudang Arsip 1 unit
- Pemeliharaan 5 unit kendaraan dinas
- Pemeliharaan mesin foto copy 3 unit
- Pemeliharaan AC kantor 20 unit
- Pemeliharaan lat-alat listrik
- Pemeliharaan komputer kantor.

A. PROGRAM KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Realisasi capaian program ini sebesar 100% sebagai bagian dari rata-rata realisasi dari 3 kegiatan dan 9 sub.

Realisasi kegiatan dan sub kegiatan pada program ini yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% yang terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu :

a. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan jasa.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu terlaksananya sosialisasi e-katalog lokal dan mekanisme pembelanjaan bagi OPD di lingkungan Provinsi Papua dan Pelaksanaan sosialisasi e-katalog lokal bagi pelaku usaha. Pencapaian 100% realisasi fisik dari sub kegiatan ini didukung dengan realisasi sumbedaya anggaran yang diperuntukan untuk :

- Penyediaan ATK kegiatan e-katalog lokal
- Cetak laporan e-katalog lokal
- Terbayarnya honorarium pelaksanaan sosialisasi e-katalog lokal
- Terlaksanya sosialisasi P3DN dan
- Perjalanan dinas dalam rangka kordinasi dan pelaksanaan sosialisasi.

Hasil capaian realisasi fisik pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi E-Katolog Lokal Bagi Pelaku Usaha

Katalog Elektronik merupakan salah satu Sistem Informasi dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP dengan tujuan untuk mewujudkan Proses pengadaan yang Cepat, Mudah, Transparan dan Tercatat Secara Elektronik. Selain itu, saat ini Katalog Elektronik juga menjadi mesin penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Penyedia UKM dan Koperasi serta mendorong pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) pada proses PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

Dasar hukum pelaksanaan e katalog lokal yaitu :

- a. Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik
- d. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggara Katalog Elektronik.

Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal oleh Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan Keputusan Kepala LKPP mengamanatkan setiap Provinsi Kabupaten/Kota dapat mengelola Katalog Elektronik Lokal.

Terkait dengan hal tersebut Provinsi Papua telah melaksanakan kegiatan sosialisasi katalog lokal kepada penyedia/pelaku usaha terutama UMKM dan sosialisasi kepada SKPD di lingkungan provinsi papua serta melakukan transaksi pembelian/e-purchasing. Pelaksanaan Sosialisasi bagi pelaku usaha dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 11-12 Juli 2022 dengan Narasumber :

1. Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Bapak R.Fendy Dharma Saputra Materi "Sosialisasi Percepatan

Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal” Materi “Kebijakan Katalog Elektronik Lokal dengan Probis Baru”

2. Analis Kebijakan Madya LKPP Bapak Eko Rinaldo Octavianus Materi “Sosialisasi Katalog Lokal Bisnis Proses Baru (Kepka 122)”
3. Penelaah Kebijakan PBJ LKPP Agung Ismail
4. Analis Kebijakan Pertama Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Diani Bahri Puteri
5. Staf Pendukung Unit Kerja LKPP Widia Cintiya Fitri
6. Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE Rinto Kurniawan, SE., M.Si Materi “Pembuatan Akun SPSE”

Hasil sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan e-katalog lokal bagi pelaku usaha dan implementasinya di peroleh hasil seperti tabel berikut :

Tabel. 2.21.

Jumlah Etalase Produk dan Penyedia Yang Terdaftar Dalam Aplikasi E-Katalog Lokal Provinsi Papua Tahun 2022

No	Etalase	Produk	Penyedia
1	Alat dan atau Mesin Pertanian	0	0
2	Alat Tulis Kantor	241	13
3	Aspal	0	0
4	Bahan Material	14	2
5	Bahan Pokok	6	1
6	Belanja Media	0	0
7	Benih Hortiultura	0	0
8	Benih Tanaman Pangan	0	0
9	Bahan Precast	0	0
10	Beton Ready Mix	0	0
11	Hewan Ternak	0	0
12	Jasa Keamanan	0	0
13	Jasa Kebersihan	12	2
14	Jasa Pengelolaan Sampah	0	0
15	Makanan dan Minuman	13	7
16	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional	17	6
17	Servis Kendaraan	45	1
18	Seragam Sekolah	3	1
19	Souvenir	138	2
Jumlah		495	35

Tabel. 2.22.
Jumlah Etalase Produk dan Penyedia Yang Terdaftar Dalam
Aplikasi E-Katalog Lokal Provinsi Papua
Tahun 2022

No	Kategori	Penyedia	
1	Alat Tulis Kantor	1	CV. Cetta Papua Mandiri
		2	CV. Multi Karya Papua
		3	CV. Rafenay
		4	Dunia Komputer
		5	PT.Papua Anderthin Mandiri
		6	Indoprima
		7	Amerta Paradina Indonesia
		8	CV. Sinar Jaya
		9	PT. Gema Mulia Semesta
		10	PT. Nex Teknologi Indonesia
		11	PT.Buana Raya Bumi Pertiwi
		12	PT. Jamesindo Sinar Sentosa
		13	PT. United Media
2	Bahan Material	1	PT. Cipta Jaya Tobati
		2	PT. Monier
3	Bahan Pokok	1	CV. Gloria Berkat Utama
4	Makanan dan Minuman	1	CV Gloria Berkat Utama
		2	CV. Dominik Mandiri
		3	Sinar Muyu
		4	Utami
		5	CV Cantika Prasmanan
		6	CV Anugerah Papua
		7	PT Hotel Oriestom Bay
5	Jasa Kebersihan	1	CV Alma
		2	PT Graha Sarana Duta
6	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional	1	Anone
		2	CV Pilar Inovasi
		3	CV Daimaru
		4	CV Cempaka
		5	CV Mudah Anugerah
		6	Reiza dan Rizky
7	Servis Kendaraan	1	PT Hinos Motors Sales Indonesia
8	Souvenir	1	CV Pilar Inovasi
		2	PT Gema Mulia Semesta
9	Seragam Sekolah	1	CV. Pilar Inovasi

Ket : data diolah <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/komoditas-kldi/D334>

2. Sosialisasi Katalog Elektronik Lokal dan Mekanisme Pembelanjaan Bagi OPD di Lingkungan Provinsi Papua. Dalam rangka percepatan pelaksanaan e-katalog lokal dan transaksi pembelanjaan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, maka telah dilaksanakan Sosialisasi Katalog Elektronik Lokal dan

Mekanisme Pembelanjaan bagi Pimpinan OPD dan PPK. Kegiatan sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui pelaksanaan e- katalog lokal bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2022 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua dengan narasumber :

1. Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Bapak R.Fendy Dharma Saputra Materi “Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal”
2. Penelaah Kebijakan PBJ LKPP Agung Ismail Materi “Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal”
3. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Debora D. Salosa, S.Hut., MM Materi “Penginputan dan Perubahan Metode Pemilihan pada SIRUP dan Penginputan Data Siswas”
4. Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE Rinto Kurniawan, SE., M.Si Materi “Penginputan dan Perubahan Metode Pemilihan pada SIRUP dan Penginputan Data Siswas”

3. Realisasi Pelaksanaan E-Katalog

Hasil pembelanjaan e-Purchasing pada katalog elektronik lokal Provinsi Papua baru telah dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua yaitu pada etalase makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional serta alat tulis kantor sebesar Rp. 421.651.000,- seperti tabel berikut :

Tabel. 2.23.

Jumlah Pembelanjaan pada e-Katalog Lokal Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022

No	Etalase	Jumlah (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	51.860.750
2	Makanan dan Minuman	1.000.000
3	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional	368.790.000
Total		421.651.000

b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yang terdiri dari realisasi belanja sebagai berikut:

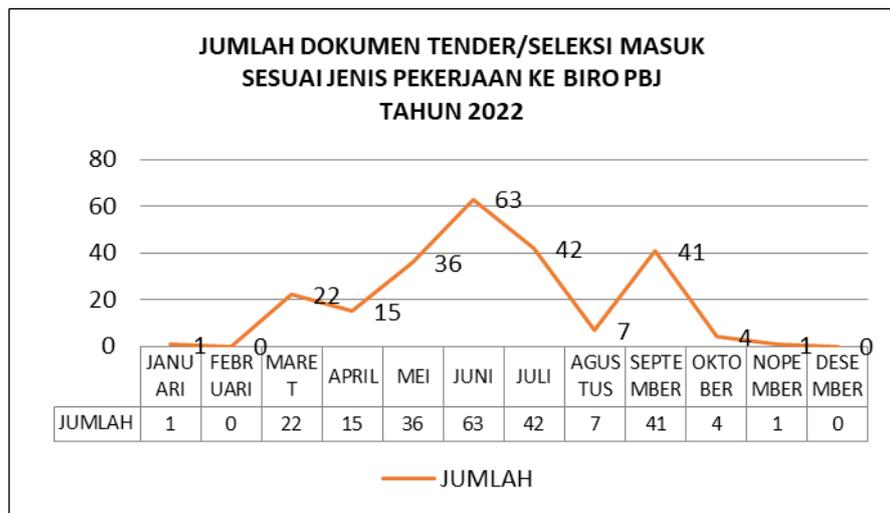
- Terbayarnya Insentif pengelola UKPBJ sesuai SK Gubernur Papua Nomor No.188.4/500/Tahun 2022 tentang pengangkatan kelompok kerja dan penetapan tunjangan profesi perangkat layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Papua
- Terbayarnya honor Pejabat Pengadaan sesuai SK Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Nomor188.4/960/Tahun 2022.
- Terealisasinya dokumen laporan kaji ulang dan laporan hasil tender.
- Tersusunnya buku standart satuan harga.
- Tersedianya materai
- Tersedianya makan dan minum penyusunan laporan hasil kaji ulang dan laporan realisasi tender.
- Terbayarnya honor tim pelaksana dan sekretariat penyusunan laporan hasil kaji ulang.
- Terbayarnya tagihan telpon/pulsa mendukung komunikasi sub bagian.
- Terbayarnya biaya sewa kendaraan pengantaran dokumen.

- o Terlaksananya perjalanan dinas mendukung kegiatan/sub kegiatan pada sub bagian.

Hasil capaian pelaksanaan sub output kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Masuk Januari s.d. Desember 2022

Dokumen Tender/Seleksi yang masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022 sebanyak 232 Paket seperti grafik berikut :



Grafik 2.1. Jumlah Dokumen Masuk Per Bulan

Jumlah dokumen masuk dari SKPD ke ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi tahun 2022 sebanyak 232 Paket. Dokumen masuk terbanyak pada bulan Juni, Juli dan September. Berdasarkan efektifitas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari aspek waktu proses tender yang berjalan pada bulan tersebut akan mempengaruhi waktu pelaksanaan dilapangan khususnya pada pekerjaan konstruksi. Keterlambatan Dokumen-dokumen yang masuk di Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Setda Provinsi Papua disebabkan karena SKPD terlambat menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan dan dokumen persiapan pengadaan.

2. Jumlah Dokumen Masuk Per Jenis

Dari 232 paket dokumen yang masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2022 berdasarkan jenis pengadaan dirinci pada tabel berikut :

Tabel 2.24

Rekapitulasi Data Dokumen Masuk Per Jenis Pengadaan
Tahun 2022

BULAN	BARANG	KONSTRUKSI	KONSULTANSI	JASA LAINNYA	JUMLAH
JANUARI	-	-	-	1	1
FEBRUARI	-	-	-	-	-
MARET	1	3	17	1	22
APRIL	-	7	8	-	15
MEI	-	33	2	1	36
JUNI	-	27	36	-	63
JULI	-	19	23	-	42
AGUSTUS	-	3	4	-	7
SEPTEMBER	1	21	19	-	41
OKTOBER	1	2	-	1	4
NOPEMBER	-	-	-	1	1
DESEMBER	-	-	-	-	-
TOTAL	3	115	109	5	232

Ket : Data diolah

3. Reviuw Dokumen Persipan Pengadaan (Kaji Ulang Dokumen)

Dalam persiapan pemilihan penyedia, Pokja akan melakukan reviu terhadap dokumen yang diserahkan oleh PPK sebelum dilaksanakan persiapan pemilihan. Kelengkapan Dokumen dari PPK disampaikan kepada UKPBJ yaitu: 1). Surat permintaan pemilihan penyedia; 2). Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) (telah ditetapkan); 3). HPS (telah ditetapkan); 4). Rancangan kontrak (telah ditetapkan); dan/atau 5). Dokumen Penetapan uang muka,

jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga, 6). Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK; 7). Dokumen Anggaran Belanja yang telah ditetapkan); 8). ID paket RUP; dan 9). rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Jumlah Pelaksanaan Reviu dokumen pengadaan tahun 2022 oleh Pokja Pemilihan bersama PPK/PPTK dan tim teknis seperti tabel berikut “

Tabel 3.25
Rekapitulasi Data Hasil Reviu
Dokumen Pengadaan Tahun 2022

NO	SKPD	TOTAL
1	DINAS PU & PR	177
2	KANWIL DJEN PERBENDAHARAAN	1
3	DISKOMINFO	1
4	DINAS KESEHATAN	0
5	DISORDA	1
6	RSUD JAYAPURA	1
7	BAPPENDA	3
8	BIRO UMUM & PROTOKOL	1
9	DINAS PERTANIAN	1
10	DINAS KELAUTAN	4
11	DINAS PENDIDIKAN	21
12	DINAS PERHUBUNGAN	19
13	D E S D M	2
	TOTAL KESELURUHAN	232

Ket : Data diolah

c. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan deteksi dini apakah aksi dan subaksi telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan target yang disepakati. Jika mengacu pada model yang telah menjadi konvensi internasional dalam pengembangan program aksi maka kegiatan monitoring memiliki ruang lingkup untuk mengukur capaian pada level proses/aktivitas dan output secara terus-menerus. Sementara kegiatan

evaluasi dilakukan untuk mengukur hasil dan dampak pada kurun waktu tertentu, biasanya pada akhir program akan selesai.

Hasil capaian pelaksanaan fisik sub kegiatan pemantauan dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 100%. Hasil capaian ini terdiri dari terealisasinya komponen belanja menunjang realisasi sub output kegiatan yaitu :

- Tersedianya ATK Monev PBJ
- Tersedianya cetak laporan Monev PBJ
- Tersedianya Makan dan minum rapat penyusunan laporan monev
- Terbayarnya honorarium tim penyusunan laporan monev
- Terlaksananya sewa kendaraan mendukung monev PBJ dan
- Terealisasinya perjalanan koordinasi/monev PBJ

Beberapa aspek yang menjadi fokus pelaksanaan monitoring Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan memantau pada aplikasi sistem dan dengan melakukan pemantauan dan pendampingan ke SKPD. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan terdiri dari :

1. Monitoring RUP

Pelaksanaan monitoring penginputan RUP dilakukan secara sistem melalui aplikasi SiRUP LKPP yang dilakukan secara berkala dan pelaksanaan monitoring ke SKPD yang dilakukan pada bulan Juli 2022.

- a. Hasil monitoring RUP melalui Sistem pada website <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap/klpd/D334>

diperoleh hasil sebagai berikut :

Dari data diatas jumlah RUP yang dinput oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebanyak

7.536 paket dengan kategori penyedia sebanyak 3803 paket dan 3553 paket kategori swakelola.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data khususnya pada kategori penyedia jumlah paket RUP menjadi 3694 paket. Data sesuai aplikasi dan hasil pemantauan, verifikasi dan validasi data sepertiii pada tabel berikut :

Tabel 2.26

Data RUP Antara sistem dan Hasil Validasi Data

METODE	JUMLAH PAKET		MENJADI
	SESUAI APLIKASI	VERIFIKASI/ VALIDASI	
1	2	3	4 (2-3)
Pengadaan Langsung	3330	101	3229
e-Purchasing	76	4	72
Seleksi	141	1	140
Penunjukan Langsung	64	0	64
Tender	168	2	166
Tender Cepat	0	0	0
Dikecualikan	24	1	23
TOTAL	3803	109	3694

Ket : Data diolah

Dari tabel diatas bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi data penginputan RUP melalui aplikasi SiRUP LKPP dari 3803 paket menjadi 3694 paket disebabkan karena adanya penginputan data RUP yang tidak memiliki nilai pagu sebanyak 109 paket. Kondisi ini disebabkan pada saat penginputan RUP tidak dilakukan verifikasi oleh SKPD terhadap paket RUP atau adanya pergeseran anggaran pada saat perubahan anggaran APBD sehingga paket atas pekerjaan tersebut ditiadakan namun tidak dilakukan penghapusan data pada aplikasi RUP.

b. RUP E-Purchasing/ e-Katalog

Sesuai instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia maka dilakukan pemantauan terhadap RUP dengan metode pemilihan secara e-purchasing. Dari Data RUP SKPD diketahui jumlah paket pengadaan yang dilakukan secara e-purchasing atau pembelian melalui e-katalog sebanyak 72 paket.

2. Monitoring Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terdiri dari pelaksanaan tender/seleksi oleh Pokja Pemilihan dan Pelaksanaan pemilihan pekerjaan non tender oleh pejabat pengadaan.

a. Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Tender/Seleksi

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pemilihan penyedia paket pekerjaan dengan metode tender/seleksi yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Biro Pengadaan dan Jasa Setda Provinsi Papua sebanyak 228 paket dan yang selesai sebanyak 226 paket sesuai tabel berikut :

Tabel 2.27

Pemantauan Hasil Pelaksanaan Tender/Seleksi Selesai

No	Uraian	Jumlah
1	Pekerjaan Konstruksi	114
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	83
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	23
4	Jasa Lainnya	3
5	Pengadaan Barang	3
	JUMLAH	226

Ket : Data diolah

Pada tabel 2.27. diatas hasil pemilihan penyedia oleh pokja pemilihan sebanyak 226 paket selesai dari 228 paket yang dilakukan proses pemilihan penyedia. Paket terbanyak yaitu pekerjaan konstruksi sebanyak 114 paket, jasa konsultansi badan usaha konstruksi 83 paket, jasa konsultansi badan usaha non konstruksi 23 paket dan jasa lainnya dan pengadaan barang masing-masing sebanyak 3 paket.

Paket gagal tender/seleksi sebanyak 2 paket dari 228 paket terdiri dari :

1. Pembangunan Dermaga danau sentani Toware di Kabupaten Jayapura Tender Gagal disebabkan Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran/ Waktu tidak cukup untuk tender ulang.
2. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura disebabkan Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.

Tabel 2.28

**Pemantauan Hasil Tender/Seleksi Terbatas
Bagi Pelaku Usaha Papua**

No	Uraian	Jumlah
1	Pekerjaan Konstruksi	22
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	2
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	1
4	Jasa Lainnya	0
5	Pengadaan Barang	0
	JUMLAH	25

Ket : Data diolah

Sesuai amanat Perpres 1/2019 dan Perpres 12 Tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 dijelaskan bahwa tender terbatas diperuntukan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua atas paket pekerjaan dengan nilai > 1 Milyar s.d. 2,5 Milyar.

Dari 228 paket tender/seleksi yang diproses pokja pemilihan sebanyak 25 paket masuk kategori tender terbatas yang diperuntukan bagi pelaku/penyedia Orang Asli Papua.

**Tabel 2.29
Penghematan Anggaran Hasil Tender/Seleksi**

NO	URAIAN	HPS	NILAI KONTRAK	PENGHEMATAN	(%)
1	2	3	4	5=(3-4)	$\frac{6}{5/3} \times 100$
1	Pekerjaan Konstruksi	1.546.798.718.482,93	1.405.771.745.349,72	141.026.973.133	9,12
2	Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi	45.633.158.104,08	41.891.412.101,97	3.741.746.002	8,20
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi	13.109.183.666,00	12.287.341.823,50	821.841.843	6,27
4	Jasa Lainnya	120.860.110.800,00	120.475.866.960,00	384.243.840	0,32
5	Pengadaan Barang	13.694.898.916,71	12.953.320.644,97	741.578.272	5,41
	JUMLAH	1.740.096.069.970	1.593.379.686.880	146.716.383.090	8,43

Ket : Data diolah

b. Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Paket Pekerjaan Non Tender.

Pada tahun 2022 paket pekerjaan non tender untuk Pengadaan langsung dan penunjukan langsung nilai pengadaan sampai dengan satu milyar rupiah dilaksanakan oleh personil ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua. Pelaksanaan pengadaan langsung berpedoman pada Perpres 12/2021 dan Pergub 46 Tahun 2021 dimana paket pekerjaan diperuntukan bagi pelaku usaha Orang Asli Papua yang terdaftar pada aplikasi Sistem Kinerja Pelaku Usaha Orang Asli Papua (SiKAP-OAP). Hasil pelaksanaan pemilihan paket pengadaan non tender berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi <https://lpse.papua.go.id/eproc4/nontender> sesuai tabel berikut :

Tabel 2.30

Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Paket Pengadaan Non Tender

No	Uraian	Jumlah
1	Pekerjaan Konstruksi	63
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	39
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	15
4	Jasa Lainnya	44
5	Pengadaan Barang	165
	JUMLAH	326

Sumber data : <https://lpse.papua.go.id/eproc4/nontender>

Hasil Pelaksanaan pemilihan penyedia paket pengadaan non tender yang dimonitor sebanyak 326 paket selesai dari 383 paket. Dari 383 paket sebanyak 57 paket tidak selesai/dibatalkan/gagal dengan beberapa alasan antarlain :

- a. Pengalaman personil pelaksana tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan,
- b. tidak ada peserta yang memasukan penawaran, ada kesalahan dokumen, Kesalahan dalam mengundang peserta, Kesalahan dalam ngimput data penyedia dalam dokumen Pemilihan,
- c. Setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi dokumen terdapat kesalahan dalam volume RAB penawaran penyedia sehingga dilakukan pengulangan paket,
- d. rekening belanja tidak satu item melainkan terdapat beberapa item belanja. belum melakukan Cek List Penyedia sehingga akan dilakukan penjadwalan ulang,
- e. PPK mengintruksikan ke PP untuk pembatalan Paket Pengadaan Perlengkapan Alat Rumah Tangga di DESDM Tahun Anggaran 2022 Karena Biaya dalam Penawaran tidak sesuai dengan item HPS,

- f. PPK salah menginput KAK Pemboran Eksplorasi Air Tanah di Perumnas 3 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura Tahun Anggaran 2022,
- g. PPK menginstruksikan ke pejabat pengadaan karena harga per item kegiatan ada yang tidak sesuai dalam HPS, Sampai Batas Akhir Pemasukan Penawaran Penyedia Tidak memasukan penawaran,
- h. Pejabat Pengadaan salah melakukan penetapan pemenang karena ternyata peserta CV. KEMBAR PUTRA PAPUA tidak hadir dalam klarifikasi teknis, negosiasi dan pembuktian kualifikasi. Sesuai undangan yang telah disampaikan kepada peserta, bahwa apabila tidak menghadiri undangan dimaksud maka dianggap mengundurkan diri dan penawaran digugurkan,
- i. Peserta tidak dapat mengupload dokumen teknis didalam aplikasi SPSE karena tidak disyaratkan oleh Pejabat Pengadaan didalam persyaratan teknis pada SPSE sehingga menyebabkan proses tidak bisa dilanjutkan. Tidak adanya syarat teknis mengacu pada LDP 10.3.e.1 dan 10.3.e.2 tercantum keterangan untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, persyaratan ini dikecualikan,
- j. terjadi BUG pada aplikasi sehingga pada saat penyedia masuk pada menu penawaran harga terjadi error dengan kode 7ollcdii7 SPSE 4.4,

- k.** Peserta tidak dapat mengupload dokumen teknis didalam aplikasi SPSE karena tidak disyaratkan oleh Pejabat Pengadaan didalam persyaratan teknis pada SPSE sehingga menyebabkan proses tidak bisa dilanjutkan.
- l.** Tidak adanya syarat teknis mengacu pada LDP 10.3.e.1 dan 10.3.e.2 tercantum keterangan untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, persyaratan ini dikecualikan,
- m.** waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi tahun anggaran,
- n.** Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran karena PPK salah memberi rekomendasi tentang penyedia yang ditunjuk kepada pejabat pengadaan.

Tabel 2.31

**Hasil Penghematan Anggaran
Paket Pengadaan Non Tender**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	HPS	95.618.771.355,96
2	Negosiasi	92.861.899.851,12
3	Penghematan (1-2)	1.429.265.018,88
4	Persen penghematan (3/1 x 100%)	1,52%

Ket : Data diolah

Hasil penghematan anggaran dari pelaksanaan pengadaan paket non tender yang selesai proses pemilihan penyedia sebesar Rp. 1.429.265.018,88 atau sebesar 1,52 persen.

Untuk paket pelaksanaan non tender yang dilakukan secara manual belum dapat dilaporkan karena data dari SKPD belum disampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dan juga PPK SKPD belum menginput dalam aplikasi SPSE pada menu pencatatan transaksi non tender sesuai surat Sekda Provinsi Papua nomor 027/15140/Set tanggal 15 Desember 2022.

c. Hasil monitoring pelaksanaan e-katalog lokal

Dari hasil monitoring terhadap pelaksanaan pembelanjaan pengadaan dengan e-purchasing pada e katalog lokal Provinsi Papua Tahun 2022 baru Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua yang melakukan pembelanjaan melalui e katalog lokal dengan jumlah pembelanjaan sebesar Rp. 421.651.750,- pembelanjaan makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional serta alat tulis kantor seperti tabel berikut :

Tabel 2.32

**Realisasi Pembelanjaan e-Katalog Lokal
Provinsi Papua**

No	Etalase	Jumlah (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	51.861.000
2	Makanan dan Minuman	1.000.000
3	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional	368.790.000
Total		421.651.750

Ket : Data diolah

2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi, Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA), Pokja Pemilihan (Pokmil), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga melayani registrasi Penyedia barang dan jasa, serta melayani pembuatan Akun Auditor dan pendampingan dalam menggunakan aplikasi pengadaan barang dan jasa.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah memfasilitasi tender dan non tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara *e-Tendering*. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*).

Dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2022 Rata-rata capaian realisasi fisik sebesar 100% yang merupakan rata-rata dari realisasi capaian 3 sub kegiatan yaitu:

a. Pengelolaan Sistem Secara Elektronik.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi rincian realisasi komponen item rincian belanja sebagai berikut :

- Terbayarnya insentif pengelola LPSE yang terealisasi sebesar 100%.
- Terealisasinya cetak dan penggandaan dokumen LPSE.
- Terealisasinya makan minum rapat kegiatan LPSE.

- Terbayarnya honorarium tenaga pendukung verifikator Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Orang Asli Papua (SIKaP OAP).
- Terbayarnya transport peserta pelatihan penginputan RUP dan SPSE.
- Terfasilitasi paket telpon pra bayar mendukung komunikasi petugas LPSE.
- Terlaksananya sewa kendaraan mendukung operasional pelaksanaan koordinasi pelayanan LPSE.
- Terealisasinya pemeliharaan server dan peralatan komputer pada bidang LPSE.
- Terealisasinya pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota dan dalam daerah dalam rangka koordinasi dan pendampingan verifikator Aplikasi SiKAP OAP.
- Terealisasinya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi dan pertemuan teknis LPSE

Di Tahun 2022, Tim LPSE juga telah melakukan pelatihan penginputan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Orang Asli Papua (SiKAP OAP) ke beberapa Kabupaten, dan terakhir kalinya diadakan di Kota Jayapura yang bertempat di Hotel Suni Abepura. Yang hadir pada pelatihan tersebut adalah verifikator SiKAP OAP 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

b. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu terealisasinya belanja sub output kegiatan yaitu:

- Terealisasinya penyediaan cetakan/penggandaan dan dokumentasi.

- Terealisasinya penyediaan makan minum rapat koordinasi kegiatan.
 - Terealisasinya pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Orang Asli Papua (SiKAP OAP).
 - Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota dan dalam daerah dalam rangka pendampingan penginputan informasi pengadaan dalam aplikasi sistem informasi pengadaan.
- c. Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.
- Capaian realisasi fisik sub kegiatan ini sebesar 100% yaitu terdiri dari terealisasinya belanja sub output kegiatan yaitu :
- Terealisasinya cetak dan penggandaan laporan administrasi kegiatan.
 - Terealisasinya penyediaan makan dan minum rapat penyusunan SPM.
 - Terbayarnya honor pengelola website Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.
 - Terealisasinya pemeliharaan jaringan internet (indihome).
 - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor.
 - Terlaksananya pemeliharaan dan penyediaan aplikasi buku tamu.
 - Terlaksananya pemeliharaan website
 - Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah.

Hasil capaian realisasi pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa tahun 2022 terdiri dari Pemeliharaan Website Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengembangkan website dan portal untuk dapat diakses masyarakat yang ingin mengetahui informasi

pengadaan barang dan jasa yaitu : portal <https://pengadaan.papua.go.id/ver03/public/> dan website biro <https://bpbj.papua.go.id/ver03/public/>

3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa.

Rata-rata capaian realisasi fisik kegiatan 100 %. Capaian realisasi kegiatan dipengaruhi oleh capaian realisasi 3 sub kegiatan yaitu :

a. Pembinaan Sumberdaya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.

Capaian realisasi fisik sebesar 100% pada sub kegiatan ini yaitu terealisasinya belanja sebagai berikut:

- Terealisasinya penyediaan ATK sub bagian.
- Tersedianya Atk kegiatan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional pengelola PBJ dan peningkatan SDM melalui Diklat Jafng Biro PPBJ
- Tersedianya materai/benda pos
- Terealisasinya makan dan minum rapat dan kegiatan
- Terbayarnya honor fasilitator peningkatan SDM
- Terbayarnya honor tim penilaian angka kredit
- Terbayarnya honor tim pembentukan JF PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain
- Terealisasinya sewa kendaraan mendukung pelaksanaan kegiatan,
- Terealisasinya sewa tempat pelaksanaan kegiatan dan
- Terlaksannya perjalanan dinas dalam rangka kordinasi/pembiinaan/pertemuan mendukung pelaksanaan peningkatan SDM.

Hasil capaian realisasi sub output kegiatan Pembinaan Sumberdaya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pelantikan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ melalui Inpassing

Sejak dibentuk Tahun 2019, Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai UKPBJ Pemerintah Provinsi Papua memiliki tiga JF PPBJ namun atas tiga JF PPBJ tersebut sudah tidak aktif sebagai JF PPBJ dan akan dihapus data dan status JF PPBJ nya pada TA 2022.

Pemerintah Provinsi Papua telah mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) melalui Surat Gubernur Papua Nomor 800/17547/SET tanggal 21 September 2020 perihal Usulan Formasi Kebutuhan JF PPBJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam surat tersebut, Biro PBJ mengusulkan kebutuhan JF PPBJ sebanyak 114 orang untuk JF PPBJ Pertama, 58 orang JF PPBJ Muda, dan 29 orang untuk JF PPBJ Madya. Atas usulan dari Biro PBJ, LKPP melalui Surat Nomor 1514/D.3/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 LKPP memberikan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional kepada Provinsi Papua sebanyak 59 personel JF PPBJ yang terdiri dari 28 orang untuk JF PPBJ Pertama, 27 orang JF PPBJ Muda, dan 4 orang JF PPPBJ Madya.

Berdasarkan rekomendasi LKPP tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan personel tersebut sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua melakukan penerimaan melalui jalur inpassing tanggal 19 Februari 2021 sebanyak 20 orang dan sesuai SK Gubernur Papua Nomor SK 821.2-1404 telah diangkat menjadi JF PPBJ tanggal 6 April 2021;

- b. Telah dilakukan penerimaan melalui jalur perpindahan dari jabatan lain sebanyak 10 orang. Dari 10 orang tersebut, sudah diangkat ke dalam JF PPBJ sesuai SK Gubernur Papua Nomor SK 821.2-919 tanggal 20 Juni 2022.
 - c. Sampai Desember Tahun 2022 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua telah memiliki 30 orang personil JF PPBJ yang terdiri dari 6 orang JF PPBJ Pertama, 20 orang JF PPBJ Muda, dan 4 orang untuk JF PPBJ Madya.
2. Pemenuhan dan Pengangkatan JF PPBJ Perpindahan Dari Jabatan Lain
- Sesuai dengan Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2022 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, maka SDM PBJ memiliki Ruang Lingkup terkait tentang Jenis SDM PBJ, Standar Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, Kegiatan Sertifikasi, dan Tugas LKPP sebagai Instansi Pembina JF PPBJ.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SDM PBJ selama tahun 2022, difokuskan kepada upaya program pemenuhan jabatan fungsional pengelola PBJ. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 74A ayat (2) dan Pasal 74B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022, bahwa Pemda wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pejabat Fungsional Pengelola PBJ minimal 60% dari Rekomendasi JF PPBJ. Sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2022 pada Pasal

5 ayat (2) terkait dengan Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ sekurang-kurangnya sudah harus mencapai 60% pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa hingga 31 Desember 2023.

Dari target minimal 60% JF PPBJ sesuai quota 59 JF PPBJ yang diberikan LKPP atau sebanyak 35 JF PPBJ yang harus dipenuhi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua mengingat sampai dengan bulan Juni 2022 baru terpenuhi 30 JF PPBJ. Untuk memenuhi target capaian keterisian JF PPBJ maka telah dilakukan perekrutan ASN pada Pemerintah Provinsi Papua melalui uji kompetensi Perpindahan dari Jabatan dan sesuai surat rekomendasi LKPP Nomor : 33000/D.3/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan surat nomor: 33536/D.3/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) maka telah diangkat 4 orang dalam JF PPBJ sepanjang terdapat formasi dengan Jenjang Jabatan, Angka Kredit Dasar, dan Angka Kredit Pengalaman Pengadaan Barang/Jasa. 4 orang ASN yang direkomendasikan untuk diangkat sebagai JF PPBJ seperti tabel berikut :

Tabel 2.33.

Rekomendasi Pengangkatan, PAK dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa JF PPBJ)

No	Nama Peserta	Jenjang JF PPBJ	Asal SKPD	Tgl Rekomendasi	Metode Pelaksanaan
1.	Adi Yuwono	Muda	Biro PBJ	19 Des' 2022	Portofolio + Ukom
2.	Gemayel Richard Kambuaya	Pertama	Biro PBJ -	19 Des' 2022	Portofolio + Ukom
3.	Yulianus Duwit	Pertama	Dinas Perikanan & Kelautan	19 Des' 2022	Portofolio + Ukom
4.	Evet Nobertus Pekei	Pertama	BPSDMP	26 Des' 2022	Portofolio + Ukom

Dengan telah dikeluarkan rekomendasi bagi 4 ASN Provinsi Papua yang telah memenuhi kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka sampai dengan Desember Tahun 2022 jumlah total JF PPBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua sebanyak 34 orang (30 orang telah dilantik dan 4 orang menunggu pelantikan)

3. Peningkatan kapasitas SDM UKPBJ melalui Bimtek/Dikalt Tahun 2022.
 - a. Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Angka Kredit (PAK) JF PPBJ.

Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 29 Tahun 2020 tentang “Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa” menggantikan Permen PANRB 77

Tahun 2012 membawa beberapa perubahan signifikan dalam tata cara penilaian kinerja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Pada aturan terbaru, Pengelola PBJ cukup menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang berisi target kinerja. Target tersebut terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit (AK) dan/atau kinerja tambahan. Untuk meningkatkan pemahaman bagi JF PPBJ dilaksanakan Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Angka Kredit (PAK) JF PPBJ yang diikuti oleh 33 orang yaitu pejabat fungsional PPBJ 30 orang dan 3 orang yang telah lulus ujian kompetensi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 24 Nopember 2022 dengan narasumber 1 orang dari LKPP RI.

b. Pembinaan SDM UKPBJ Kab/Kota

Selama tahun 2022 telah dilakukan Pembinaan UKPBJ kab/kota se Papua dilakukan kepada 29 Kab/kota se Papua dengan melibatkan 30 orang tenaga JF PPBJ biro PBJ dengan menempatkan 1 org tenaga Jafung per kab/kota yang dipimpin oleh seorang koordinator dari pejabat struktural.

Kegiatan pembinaan fokus pada pemenuhan unsur-unsur indeks tata kelola pengadaan (ITKP) melalui kunjungan langsung dari kab/kota ke Biro PBJ, dan atau sebaliknya dari biro PBJ ke Kab/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Hampir 75% dari seluruh kab/kota telah datang melakukan

koordinasi di Biro PBJ terkait bagaimana pemenuhan jafung pengelola PBJ, e-Katalog, SPSE, dan berkaitan dengan tingkat kematangan UKPBJ. Tingkat pemenuhan jafung yang sudah mencapai 54.24%, sangat mempengaruhi penilaian ITKP Biro PBJ. Sampai dengan akhir tahun 2022, pencapaian ITKP Biro PBJ sebesar 75,6 banyak didukung oleh pemenuhan unsur Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ sebesar 16,3.

4. Pembentukan Tim Penilai JF PPBJ

Guna Penilaian Angka Kredit JF PPBJ dalam rangka mengetahui kinerja dari JF PPBJ telah dibentuk tim penilai angka kredit sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 800/13338/SET tanggal 09 November 2022 yang bertujuan untuk mengukur capaian kinerja JF PPBJ pada Biro Pegadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier JF PPBJ.

b. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang Dan Jasa.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100% yaitu dengan terealisasinya komponen belanja sebagai berikut:

- Terealisasinya penyediaan ATK administrasi sub bagian dan ATK pelaksanaan Temu Daerah UKPBJ kabupaten/kota se Provinsi Papua.
- Terealisasinya cetak laporan sub bagian cetak dokumen pelaksanaan kegiatan kelembagaan UKPBJ dan pelaksanaan temu daerah.

- Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat penyusunan tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan temu daerah
- Terbayarnya honor tim peningkatan tingkat kematangan UKPBJ
- Terbayarnya honor panitia dan narasumber pelaksanaan Temu Daerah UKPBJ Kab/Kota se-Provinsi Papua.
- Terealisasinya sewa kendaraan mendukung operasional sub kegiatan.
- Terlaksananya perjalanan dinas mendukung sub output kegiatan

Realisasi capaian sub output kegiatan Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2022 yaitu :

1. Pelaksanan Rapat Temu Daerah UKPBJ Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
2. Capaian Indeks Tingkat Kematangan UKPBJ
Pemerintah Provinsi Papua telah mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif) pada seluruh variabel tingkat kematangan UKPBJ(9/9) di tanggal 31 Oktober 2022 melalui verifikasi dokumen bukti dukung yang disampaikan pada Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU), UKPBJ Provinsi Papua yang dibuktikan dengan Surat Kepala LKPP Nomor 27971/KA/11/2022 tanggal 1 November 2022 perihal Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif.
3. Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 telah mencapai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 75 kategori predikat “Baik” sesuai Surat Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28432/SES/11/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Penayangan Hasil Sementara Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan K/L/PD Tahun 2022 pada Aplikasi SIMKU, Pemerintah Provinsi Papua telah mencapai ITKP dengan predikat baik yang diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 2.34.

Nilai ITKP Provinsi Papua Tahun 2021 dan 202

No	Keterangan	Nilai
1	SIRUP	10
2	<i>E-Tendering</i>	5
3	<i>E-Purchasing</i>	0
4	<i>Non e-Tendering/Non e-Purchasing</i>	0
5	E-Kontrak	4,3
6	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	16,3
7	Tingkat Kematangan UKPBJ	40
8	Total Nilai Pembobotan	75,6
9	Predikat	Baik

Ket : <https://siukpbj.lkpp.go.id>

Kompenen yang belum terpenuhi dalam penilaian ITKP Provinsi Papua dan menjadi catatan dalam perbaikan kedepannya adalah mendorong pelaporan paket pekerjaan Non e-tendering/Non e-purchasing. Namun dibanding dengan nilai ITKP Tahun 2021 sebesar 67,93 kategori predikat “Cukup” nilai ITKP Provinsi Papua Tahun 2022 sebesar 75 predikat “baik”.

c. Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa.

Capaian realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100% yaitu terealisasinya komponen belanja sebagai berikut:

- Terbayarnya Honorarium Kordinasi APIP dan APH
- Terealisasinya penyediaan ATK sub bagian.
- Terealisasinya penyediaan cetakan bahan kegiatan, dokumentasi, publikasi dan laporan sub bagian.

- Terbayarnya honorarium narasumber Pertemuan kordinasi APIP dan APH.
- Terbayarnya sewa kendaraan
- Terealisasinya sewa gedung tempat pertemuan Kordinasi APIP dan APH
- Terealisasinya kontribusi Bimtek 4 orang
- Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota/dalam daerah dalam rangka kordinasi/konsultasi, pelaksanaan Bimtek Aspek Hukum PBJ dan pelatihan pembentukan jafung PBJ, Bimtek pengadaan barang dan jasa dan diklat sertifikasi barang jasa.

Hasil capaian realisasi sub kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kordinasi APIP dan APH.

Koordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Untuk menjalin kerjasama, adanya komunikasi yang intens antara APIP dan APH serta Biro PBJ Setda Provinsi Papua dalam penanganan masalah Pengaduan masyarakat terhadap PBJ;
- b. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pengaduan Masyarakat terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua.
- c. Untuk meningkatkan pemahaman Pengelola PBJ pada Biro PBJ SETDA Provinsi Papua tentang Mitigasi Risiko Pengaduan Masyarakat tentang PBJ;
- d. Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 23 November 2022 di Hotel Horison Jayapura.

b. Capaian Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.35.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN		
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.539.153.200	27.112.890.544	98,45
2	Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	19.569.066.000	19.566.376.000	99,99
	JUMLAH	47.108.219.200	46.679.266.544	99,09

Pada Tabel 3.47. dijelaskan Realisasi anggaran Tahun 2022 atas pelaksanaan 2 program yaitu Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 46.679.266.544,- dari Jumlah anggaran Rp. 51.710.832.474,- atau terealisasi 99,09 persen.

Tabel 2.36.

Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022

Program	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran	REALISASI		Sisa Anggaran	
				Total	%		
0.00 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0.00 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 1.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.000.000,00	279.840.000,00	99,94	160.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	112.820.278,00	112.800.000,00	99,98	20.278,00	
	0.00 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 1.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.108.243.672,00	11.737.083.405,00	96,93	371.160.267,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	0,00	
	0.00 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 1.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	370.500.000,00	368.790.000,00	99,54	1.710.000,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	332.500.000,00	304.147.394,00	91,47	28.352.606,00	
	0.00 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0.00 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 1.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	369.399.250,00	355.034.475,00	96,11	14.364.775,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	803.000.000,00	802.392.900,00	99,92	607.100,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	59.780.000,00	99,63	220.000,00
			Penyediaan Bahan/Material	1.180.000.000,00	1.176.665.069,00	99,72	3.334.931,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.055.360.000,00	2.055.200.000,00	99,99	160.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.422.900.000,00	5.421.433.682,00	99,97	1.466.318,00
	0.00 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	156.980.000,00	156.500.000,00	99,69	480.000,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.477.200.000,00	3.473.644.750,00	99,90	3.555.250,00	
	0.00 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 1.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	353.250.000,00	353.003.413,00	99,93	246.587,00	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	399.575.456,00	99,89	424.544,00	
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			27.539.153.200,00	27.112.890.544,00	98,45	426.262.656,00
	4.01 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 7 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.01 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 7.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	0,00
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	10.375.125.000,00	10.374.125.000,00	99,99	1.000.000,00
			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	1.111.000.000,00	1.111.000.000,00	100,00	0,00

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

		Barang dan Jasa				
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 7.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	2.257.821.000,00	2.256.131.000,00	99,93	1.690.000,00
		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	554.750.000,00	554.750.000,00	100,00	0,00
		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	581.000.000,00	581.000.000,00	100,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01.2.0 . 7.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00	100,00	0,00
		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.335.930.000,00	1.335.930.000,00	100,00	0,00
		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	877.640.000,00	877.640.000,00	100,00	0,00
TOTAL PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			19.569.066.000,00	19.566.376.000,00	99,99	2.690.000,00
TOTAL (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI + PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA)			47.108.219.200,00	46.679.266.544,00	99,09	428.952.656,00

2.2. ISU-ISU PENYELENGGARA TUGAS DAN FUNGSI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta capaian kinerja Tahun 2019-2023 terdapat isu strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan
2. Pencegahan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa;
3. Percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
4. Belum optimal pengadaan barang dan jasa secara digital/system
5. Afirmasi Pelaku Usaha Papua
6. Kualifikasi dan SDM PBJ, dan

7. Pemenuhan domain terhadap penilaian Tingkat kematangan UKPBJ

2.3. RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024.

Sesuai Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 yaitu
“ Mewujudkan Masyarakat Papua Yang Mandiri Dalam Segala Bidang Dalam Tata Kehidupan Yang Harmonis Dan Selaras Dengan Alam”

Tema tersebut mengandung makna bahwa di tahun 2024, pembangunan Provinsi Papua diarahkan untuk memastikan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai visi RPJMD melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang (Pendidikan, Kesehatan, ekonomi dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas

Penyusunan RENJA Tahun 2024 berisikan usulan rencana kerja program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua mengacu Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yaitu prioritas 5 “Peningkata Tata Kelola Pegadaan”

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa, tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. Adapun sasaran target rencana kerja Biro Pengadaan Barnag dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024 sebagai Berikut :

Tabel 3.1.

Target Capaian Sasaran Strategis
Biro Pegadaan Barng dan Jasa Setda Provinsi Papua
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Terwujudnya pemanfaatan system pengadaan	Persen	100
		Terpenuhi Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Persen	100
		Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3
2	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Nilai SAKIP	Nilai	A

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tahun 2024 adalah rencana kerja terkait dengan rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung sasaran kinerja. Rencana kerja tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 39 (tiga puluh

sembilan) sub kegiatan, yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Papua sebesar Rp. **19.039.000.000**. Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 seperti yang tersaji padatabel 3.2 berikut ini :

.

Tabel 3.2.
RENCANA KERJA
PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

Kode					URUSAN	KINERJA URUSAN			Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
					BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA					19,039,000,000.00			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					19,039,000,000.00			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					19,039,000,000.00			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					17,539,000,000.00			
4	01	01	1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					300,000,000.00			
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	3 Dokumen	-	150,000,000.00	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD								
						-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Jayapura Semua Kecamatan Semua	-	1 Dokumen	-	30,000,000.00	

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

								Kel/Desa							
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
					-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Dokumen	-		30,000,000.00			
4	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
					-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Jayapura Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-		30,000,000.00			
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
					-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	5 Laporan	-		60,000,000.00			
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										140,000,000.00
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Dokumen	-	30,000,000.00		
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	50 Dokumen	-	30,000,000.00		
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	30,000,000.00		
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	3 Laporan	-	30,000,000.00		
4	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

					-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Dokumen	-	20,000,000.00
4	01	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20,000,000.00
4	01	01	1.03	0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
					-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Dokumen	-	-
4	01	01	1.03	0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
					-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	20,000,000.00
4	01	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					6,810,000,000.00
4	01	01	1.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
					-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Paket	-	56,000,000.00
4	01	01	1.05	0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

						-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Dokumen	-	30,000,000.00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	10 Orang	-	150,000,000.00		
4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	100 Orang	-	250,000,000.00		
4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	20 Orang	-	150,000,000.00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									6,144,000,000.00
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Paket	-	30,000,000.00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Paket	-	200,000,000.00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
						-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Paket	-	300,000,000.00		
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	12 Dokumen	-	70,000,000.00		
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
						-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Paket	-	1,200,000,000.00		

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
					-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	1,344,000,000.00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
					-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	3,000,000,000.00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				350,000,000.00			
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
					-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Paket	-	50,000,000.00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Unit	-	250,000,000.00	
4	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

					-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kota Jayapura Jayapura Utara Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	50,000,000.00
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,775,000,000.00
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	200,000,000.00
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik						
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	75,000,000.00
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	2,500,000,000.00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			650,000,000.00				
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	12 Unit	-	300,000,000.00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
					-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	20 Unit	-	150,000,000.00	
4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
					-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Unit	-	200,000,000.00	
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						7,200,000,000.00	
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						4,200,000,000.00	

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa							
					-	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Jayapura Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	500,000,000.00	
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa							
					-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	3,200,000,000.00	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa							
					-	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	500,000,000.00	
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							1,500,000,000.00
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik							
					-	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	900,000,000.00	
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa							

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

					-	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	400,000,000.00		
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa								
					-	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Laporan	-	200,000,000.00		
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								1,500,000,000.00
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa								
					-	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	50 Orang	-	500,000,000.00		
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa								
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Dokumen	-	500,000,000.00		
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa								

**RENCANA KERJA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024**

						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Jayapura Jayapura Utara Mandala	-	1 Dokumen	-	500,000,000.00
TOTAL									19,039,000,000.00			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat strategis dan terfokus pada kebijakan untuk dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua pada Tahun 2024.

Demikian RENJA ini dibuat dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.